

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

بادان بنگلوا كيان دان ايت

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta Telp. (0274) 562811 Ext. 1117 s/d 1122 Fax. (0274) 564544
Website : <http://bpka.jogjaprov.go.id> Email: bpka@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

NOTULEN

- Sidang/Rapat : Diskusi Hasil Fasilitasi Rapergub Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda DIY
- Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2024
- Pukul : 13.00 WIB s.d. selesai
- Tempat Sidang/Rapat : RR. B Gedung Puntadewa 2.2, Bidang BAKD, BPKA DIY
- Acara : Diskusi Hasil Fasilitasi Rapergub Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda DIY
- Pimpinan Sidang/Rapat : Endrawati Utami, S.E., M.Acc.
- Ketua : Saptari Indriani, SE.M.Acc
- Sekretaris : Dhoby Menzano Andrian, S.E.
- Pencatat : Dhoby Menzano Andrian, S.E.
- Peserta sidang/Rapat : 1. Ka. BPKA DIY (sebagai laporan)
2. Sekretaris BPKA DIY
3. Ka. Bid. Anggaran Pendapatan BPKA DIY
4. Ka. Bid. Akuntansi BPKA DIY
5. Ka. Bid. Anggaran Belanja BPKA DIY
6. Ka. Bid. Pengelola Kas Daerah BPKA DIY
7. Ka. Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKA DIY
8. Ka. Bid. BAKD BPKA DIY
9. Ka. Sub. Bidang BAKD BPKA DIY
10. Staf Bidang BAKD BPKA DIY
- Kegiatan Sidang/rapat : Diskusi Hasil Fasilitasi Rapergub Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda DIY
1. Pembukaan : Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah dengan berdoa bersama dan pengantar.
2. Pembahasan : 1. Pembahasan Biro Hukum, Pasal 85 disajikan sejak awal untuk dicabut.
2. Pada saat penetapan perlu penetapan ulang.
3. Masalah TU pada pasal 167 bahwa, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan sub kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS/ SPP UP/ GU. Selain itu Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
4. PPKD selaku BUD melalui Bidang Pengelola Kas Daerah selaku BUD menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan yang tidak melalui RKUP sebagai bagian dari Rekonsiliasi pendapatan. Disini

mengembalikan fungsinya yang dulunya diampu Bidang Akuntansi sekarang Bidang Pengelola Kas Daerah.

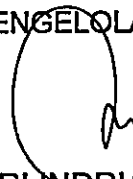
5. Jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD. Untuk jaminan bisa dari jaminan asuransi.
6. Pengembalian uang jaminan kepada pihak ketiga dilakukan dengan surat perintah BUD.
7. Pasal 146 ayat 1 bahwa pertanggungjawaban fungsional oleh Bendahara Penerimaan SKPD kepada PPKD selaku BUD melalui Bidang Anggaran Pendapatan tembusannya Bidang Akuntansi dan Inspektorat paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
8. Penunjukan pejabat struktural eselon IV dilakukan apabila seluruh pejabat eselon III telah ditunjuk sebagai PPTK tetapi masih terdapat sub kegiatan yang belum memiliki pengampu.

3. Keputusan

- : 1. Mengadakan sosialisasi Pergub Sisdur, penekanan pada uang jaminan, dimana bentuk sosialisanya dengan pihak ketiga melalui website atau BLP.
2. Pasal 12 ayat 5 tentang PPTK dimasukkan surat edaran awal tahun.
 3. Pasal 216 dituliskan Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tahun anggaran 2025.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

KEPALA SUBBIDANG
BINA ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



SAPTARI INDRIANI, SE.M.Acc

NIP. 19840616 200902 2 006